

## **Pemodelan Karakteristik Pemukiman Desa Pesisir Pantai di Kabupaten Maros**

### ***Modeling Of Characteristics Of Settlement Of Coastal Coast Village In Maros District***

**Firdaus Daud**

Dosen Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar

Koresponding Author: [Firdausdaud0557@gmail.com](mailto:Firdausdaud0557@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

*Penelitian bertujuan untuk mengetahui :1) Karakteristik permukiman, 2) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, 3) Kondisi fisik lingkungan permukiman, 4) Keterkaitan antara karakteristik permukiman dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, 5) Keterkaitan antara karakteristik permukiman dengan fisik lingkungan permukiman, 6) Pemintakatan bahaya bencana gelombang pasang desa-desa pesisir Pantai di Kabupaten Maros. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kepala Keluarga pada Desa-Desa pesisir Pantai di kabupaten Maros. Penentuan sampel sebagai responden indepth interview digunakan teknik quota sampling sebanyak 40 KK diambil sebagai responden. Penentuan dilakukan secara acak untuk masing-masing 10 KK di Desa Ampekale, Bonto Bahari, Pajukkukang Nisombalia. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Karakteristik pemukiman masyarakat pesisir pantai berada pada kategori tipe B dimana rumah berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, 2) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat ditandai dengan tingkat pendidikan pada kategori rendah (tidak tamat SD dan SD), dicirikan oleh pekerjaan sektor nelayan, dan tingkat pendapatan sedang, 3) Kondisi fisik rumah masyarakat pesisir pantai dapat diketahui melalui jenis rumah didominasi kayu, lantai dasar rumah umumnya kayu, tipe atau ukuran rumah, dinding rumah, pencahayaan rumah katagori cukup, 4) Kondisi sosial-ekonomi berkaitan secara signifikan dengan karakteristik pemukiman, 5) Kondisi lingkungan fisik berkaitan secara signifikan dengan karakteristik pemukiman, dimana semakin tinggi kondisi social ekonomi maka semakin baik karakteristik atau tipe pemukiman desa pesisir Pantai 6) Secara umum tingkat bahaya terhadap bencana gelombang pasang di pesisir pantai berada pada tingkat sedang di Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada: 1) Dinas Tata Ruang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir mengenai pemukiman yang berkualitas, 2) Dinas sosial untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya meningkat status sosial masyarakat pesisir, 3) Dinas Pemukiman untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan fisik yang berkualitas, 4) Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Maros mengenai mitigasi bencana gelombang pasang secara*

*intensif, mengingat masyarakat setempat kurang memiliki kesadaran terhadap potensi bencana tersebut.*

Kata Kunci: Karakteristik Pemukiman, sosial-ekonomi, fisik lingkungan,

### **ABSTRACT**

*The research aims to find out: 1) Characteristics of settlements, 2) Socio-economic conditions of society, 3) Physical conditions of residential environments, 4) Linkages between characteristics of settlements with socio-economic conditions of the community, 5) Linkages between characteristics of settlements with physical neighborhoods, 6 ) Pemintakatan disaster wave tidal coastal villages in Maros Regency. The population in the study was all the heads of families in coastal villages in Maros district. Determination of sample as independent interview respondents used quota sampling technique as many as 40 families taken as respondents, the determination was done randomly for each of the 10 families in Ampekale Village, Bonto Bahari, Pajukkukang Nisombalia. The results of the study show: 1) Characteristics of coastal community settlements in the type B category where patterned houses are clustered or random, medium density, medium quality buildings, 2) Community socio-economic conditions are characterized by education levels in the low category (not graduating from elementary school and SD), characterized by fishing sector work, and moderate income level, 3) The physical condition of coastal communities can be known through types of houses dominated by wood, the ground floor of a house is generally wood, the type or size of a house, house walls, adequate lighting, 4 ) Socio-economic conditions are significantly related to the characteristics of settlements, 5) Physical environmental conditions are significantly related to the characteristics of settlements, where the higher the socio-economic conditions, the better the characteristics or types of coastal village settlements 6) In general the level of danger of tidal waves on the coast is at level sedang in Maros. Regency Based on the results of the study, it is suggested to: 1) Spatial Planning Agency to socialize to coastal communities regarding quality settlements, 2) Social services to conduct socialization on the importance of increasing social status of coastal communities, 3) Dinas Pemukiman to disseminate information to coastal communities regarding the importance of managing a quality physical environment, 4) It is necessary to disseminate information to coastal communities in Maros District regarding tidal disaster mitigation intensively, considering that local communities lack awareness of the potential for such disasters.*

Keywords: Characteristics of Settlements, socio-economic, physical environment,

### **PENDAHULUAN**

Pesisir pantai dari sisi geografi dan letaknya merupakan daerah pertemuan antara air tawar dan air laut. Pesisir pantai ini memiliki keunggulan berupa potensi ekosistem pesisir yang besar baik ekosistem alami (terumbu karang, mangrove, padang lamun,

pantai berpasir, laguna, estuaria dan delta) maupun ekosistem buatan (tambak, sawah, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan permukiman) yang dapat dikembangkan guna memajukan perekonomian dan memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai aktivitas tersebut menjadikan kawasan pesisir berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dan menjadi tempat yang paling banyak dihuni oleh manusia serta dapat mendorong berdirinya kawasan industri dan permukiman hingga berkembang menjadi perkotaan. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UUD RI, no. 1, th 2014, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil). Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah pesisir pantai ini bukan hanya karena kekahiran, melainkan juga karena migrasi dan tujuan urbanisasi maka semakin meningkat pula kebutuhan tempat tinggal atau permukiman.

Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, maka wilayah pesisir dijadikan tempat untuk bermukim, selain memiliki karakteristik pola permukiman yang dipengaruhi oleh keadaan topografi, juga harus memperhatikan syarat kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas yang dibutuhkan guna mendukung kehidupan dan aktivitas lainnya. Berdasarkan pedoman standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2001, salah satu utilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yaitu air bersih. Kebutuhan akan air digunakan oleh masyarakat untuk MCK (mandi, cuci dan kakus) dan untuk air minum. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh air. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Air tanah berasal dari air hujan dan air permukaan, yang meresap mula-mula ke zona tak jenuh dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Air tanah berinteraksi dengan air permukaan serta komponen-komponen lain seperti jenis batuan penutup, penggunaan lahan, serta manusia yang di permukaan. (Ali Masduqi, 2008). Suprijanto (2003) dalam Zain (2007) menerangkan bahwa tahap awal perkembangan kawasan permukiman di kota pantai baik berupa kelompok permukiman di pantai maupun di atas air yaitu adanya ketersediaan sumber air untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat. Berdasarkan hal ini maka ketersediaan air khususnya air tanah merupakan hal yang diperhitungkan dalam penentuan lokasi perkembangan dan pertumbuhan kawasan permukiman. Semakin berkembangnya permukiman maka ketergantungan terhadap kebutuhan air tanah juga semakin meningkat. Keadaan hidrologi di Kabupaten Maros dapat diamati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (run off) dan sebagian lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat-tempat yang dangkal, serta sebagian lagi mencapai tempat-tempat yang dalam, dimana sering dikategorikan sebagai air tanah tertekan yang dapat diperoleh dari pemoran dengan kedalaman 75-100 meter (buku putih Sanitasi Kab Maros)

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki wilayah kepesisiran yang secara administrasi

berada di Kecamatan Lau, Bontoa, Maros Baru dan Marusu. Berdasarkan data jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga, peningkatan jumlah penduduk, pada tahun 2010 dengan jumlah 320103 jiwa di tahun 2014 menjadi 335.596 jiwa di tahun 2015 jumlahnya 339.300 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Turikale dengan jumlah 43.778 jiwa. Jumlah rumah tangga terjadi pada tahun 2015 di Kecamatan Lau dengan jumlah 4128 rumah tangga, Kecamatan Bontoa dengan jumlah 8357 rumah tangga, dan Kecamatan Maros Baru dengan jumlah 8357 rumah tangga dan Kecamatan Marusu dengan jumlah 4138 rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga ini berpengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman dan kebutuhan akan sumberdaya air. Secara geografis Kabupaten Maros memiliki panjang pantai 36 km dan terletak pada koordinat antara 119°20'59"– 119°58'12" Bujur Timur dan 4°43'12"–5°11'24" Lintang Selatan, berpotensi sangat baik untuk pengembangan budidaya tambak. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi daratan pesisir di Kabupaten Maros umumnya landai, terletak berhadapan dengan Selat Makassar yang perairan lautnya terbuka dan dangkal. Memiliki 2 sungai besar yaitu Sungai Maros dan Sungai Binangasangka serta beberapa sungai kecil seperti Sungai Pajukukang, Sungai Marana, Sungai Kalumpang, Sungai Bawalangiri, Sungai Singkanipisi, Sungai Borongkalukua, dan Sungai Kuri Lompo (Kabupaten Maros dalam Angka)

Pemanfaatan lahan di pesisir Kabupaten Maros selain digunakan untuk permukiman digunakan pula untuk kegiatan pertambakan dan pertanian pesisir. Pertanian pesisir Kabupaten Maros berupa sawah bagi kegiatan pertanian pesisir. Potensi di bidang pertanian ini akan meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk karena ketersediaan lahan untuk kegiatan perekonomian. Lahan untuk pertanian pesisir dapat berpeluang sangat besar untuk dialihfungsikan menjadi permukiman jika kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Elemen-elemen yang terdapat di dalam bentuk lahan mempunyai potensi berbeda-beda untuk berbagai peruntukan, sehingga kondisi ini yang dipertimbangkan manusia dalam pemilihan lokasi untuk permukiman mereka (Pratyastuti, 2009). Selain itu, bentuklahan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap karakteristik air tanah karena perbedaan karakteristik litologi, struktur dan proses tertentu (Wulaningrum, 2002) dan berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman (Pratyastuti, 2009).

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun di wilayah kepesisiran Kabupaten Maros akan meningkatkan pertumbuhan permukiman pesisir. Berkembangnya kebutuhan tempat tinggal atau permukiman dikhawatirkan akan mengakibatkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian pesisir menjadi lahan permukiman. Berkembangnya kebutuhan permukiman selain mempertimbangkan keadaan topografi juga ketersediaan sumber air, sehingga pola persebaran permukiman cenderung memperhatikan lokasi ketersediaan sumber air. Perbedaan ketersediaan dan kemudahan mendapatkan sumber air terutama air tanah akan membentuk pola persebaran permukiman tertentu. Selain ketersediaan air, pola persebaran permukiman juga akan berbeda satu dengan lainnya pada persebaran keruangan bentuklahan yang mempunyai

karakteristik lahan yang berbeda pula. Perbedaan karakteristik bentuk lahan seperti litologi, struktur dan proses tertentu maka akan berbeda pula karakteristik airtanahnya. Pemanfaatan lahan yang terus meningkat di sektor permukiman pesisir sementara lahan bersifat tetap akan berdampak pada perubahan karakteristik airtanah baik kualitas dan kuantitasnya. Alluvial Muda merupakan endapan alluvium (endapan aluvial sungai pantai dan rawa) yang berumur kuartar (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng <3%. Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal dengan tingkat kesuburan yang tinggi.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kejadian yang disebabkan oleh alam maupun non alam yang memicu terjadinya bencana menunjukkan peningkatan, baik dalam karakteristik maupun tingkat risikonya, terutama di Negara-negara berkembang (Twig & Batt, 1998). Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat peningkatan kegiatan eksploitasi manusia atas alam menjadi pemicu peningkatan risiko terjadinya bencana. Tingkat kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh pada tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan, terutama di Negara kepulauan seperti Indonesia. Kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh telah menyadarkan sebagian besar penduduk Indonesia akan resiko bencana di kawasan pesisir dan pantai.

Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar terjadi di dalam laut sebelah barat Pulau Sumatra di dekat Pulau Simeuleu. Gempa bumi ini memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 225.000 jiwa di sebelas negara dan menimbulkan kehancuran hebat di banyak kawasan pesisir di negara-negara yang terkena. Di Indonesia sendiri gempa bumi dan tsunami mengakibatkan sekitar 165.708 korban jiwa dan nilai kerusakan yang ditimbulkannya mencapai lebih dari Rp 48 triliun (Renas 2014). Beck (1998) merumuskan telah terjadinya pergeseran peradaban *first modernity* ke *second modernity*, yang mengakibatkan peningkatan *risk society*, yaitu adanya pergeseran masyarakat industri ke masyarakat modern akhir (*late modern society*). Pergeseran tersebut ditandai dengan pemahaman masyarakat tentang bencana, yaitu bencana yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak diperhitungkan dan diketahui dampak bencananya yang dapat memicu terjadinya krisis yang semakin besar. Menurut Giddens (1990) modernitas merupakan kultur berisiko; pada satu sisi mengurangi risiko suatu bidang dan kebutuhan tertentu hidup manusia, tetapi pada waktu bersamaan memunculkan bentuk risiko baru yang sebagian besar belum dikenal dalam masa sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlu adanya sosialisasi mengenai tingkat bahaya yang mungkin terjadi di daerah-daerah permukiman di sepanjang pantai dan pesisir, terutama pada pantai yang berhadapan langsung dengan zona tumbukan lempeng tektonik.

Permukiman merupakan daerah yang paling penting dalam kegiatan mitigasi bencana alam, karena merupakan tempat tinggal dan tempat berkumpulnya penduduk (Katayama, 2000). Kerugian terbesar akibat bencana umumnya terdapat pada daerah pemukiman penduduk. Mengidentifikasi karakteristik permukiman perlu dilakukan untuk dapat mengenali tingkat risiko bencana yang mungkin terjadi.

UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang bertujuan untuk menjamin

terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Untuk dapat mewujudkan program tersebut, maka dipandang perlu untuk menilai kerawanan bencana tiap-tiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman desa-desa pesisir sepanjang Pantai Utara kabupaten Maros. Pemilihan Kabupaten ini sebagai daerah penelitian didasari pertimbangan bahwa di Kabupaten ini memiliki pantai yang berhadapan dengan Samudera Indonesia dan umumnya morfologi pantainya cenderung landai. Sebagaimana diketahui bahwa di Samudera Indonesia terdapat pertemuan lempeng tektonik Australia dan Euro-Asia sehingga kemungkinan terjadinya tsunami relatif besar. Dengan morfologi pantai yang landai, maka apabila terjadi gelombang pasang menyebabkan air akan masuk ke daratan relatif jauh sehingga daerah luapan airnya sangat luas.

Penelitian ini ialah pemodelan karakteristik permukiman, lingkungan fisik, dan kondisi sosial ekonomi desa pesisir. Lokasi Penelitian adalah desa-desa yang memiliki pantai dalam Wilayah Kabupaten Maros. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui : 1) Karakteristik permukiman, 2) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, 3) Kondisi fisik lingkungan permukiman, 4) Keterkaitan antara karakteristik permukiman dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, 5) Keterkaitan antara karakteristik permukiman dengan fisik lingkungan permukiman, 6) Pemintakatan bahaya bencana gelombang pasang desa-desa pesisir Pantai di Kabupaten Maros

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa-Desa pesisir pantai Kabupaten Maros, digunakan metode *survey* yaitu memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual di lapangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. bersifat *ex-post facto*, dan merupakan Penelitian *Explanatory research* yaitu untuk menghubungkan/mengaitkan variabel bebas yaitu kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik lingkungan dengan variabel terikat yaitu karakteristik pemukiman masyarakat desa-desa pesisir pantai di Kabupaten Maros.

### **2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian seluruh Kepala Keluarga Penentuan sampel sebagai responden indepth interview digunakan teknik quota sampling. Sampel sebanyak 40 KK diambil sebagai responden, secara acak masing-masing desa diwakili oleh 10 orang di Desa Ampekale, Bonto Bahari dan Nisombalia

### **3. Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data dengan dokumen yaitu mengambil data melalui profil desa dan peta desa. Pengumpulan data untuk karakteristik pemukiman digunakan

pedoman wawancara, dan status social ekonomi dan karakteristik fisik lingkungan digunakan Angket.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak analisis statistic SPSS versi 20. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis spasial dan analisis statistik deskriptif (tabel frekuensi maupun tabel silang).

### HASIL PENELITIAN

#### 1. Deskripsi Karakteristik Pemukiman Masyarakat di desa pesisir Pantai Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel karakteristik pemukiman masyarakat di desa pesisir pantai Kabupaten Maros sebagai variabel terikat menunjukkan bahwa dari 40 Kepala Keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 13 (32,5%) KK yang rumahnya berada pada kategori tipe A adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik, sebanyak 20 (50,0%) KK yang rumahnya berada pada kategori tipe B adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, sebanyak 7 (17,5%) KK diantaranya yang rumahnya berada pada kategori tipe C adalah pemukiman berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa, secara umum tipe pemukiman Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros adalah tipe pemukiman dengan kategori C.

#### 2. Deskripsi kondisi sosial-ekonomi Kepala Keluarga di desa-desa pesisir Pantai Kabupaten Maros

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk di desa-desa pesisir Pantai Kabupaten Maros, dapat ditelaah berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi.

##### a. Deskripsi Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel tingkat pendidikan Kepala Keluarga masyarakat di desa pesisir pantai Kabupaten Maros sebagai variabel bebas menunjukkan bahwa dari 40 Kepala Keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 23 (57%) KK diantaranya yang tingkat pendidikannya “Tidak Tamat SD”, 11 (27,5%) tingkat pendidikannya “SD”, 3 (7,5%) KK tingkat pendidikannya “SMP”, 2 (5%) tingkat pendidikannya “SMA”, 1 (2,5%) KK tingkat pendidikannya “Sarjana”. Secara umum tingkat pendidikan Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros adalah SD dan Tidak Tamat SD masing-masing pada frekuensi 11 (27,5%) dan 23 (57,5%).

**b. Deskripsi Pekerjaan Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pekerjaan menunjukkan bahwa dari 40 Kepala Keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 3 (7,5%) KK diantaranya yang jenis pekerjaannya “Buruh Harian”, 30 (75%) KK yang pekerjaannya “Nelayan/Pedagang”, 7 (7,5%) KK tingkat pendidikannya “SMP”, 2 (5%) tingkat pendidikannya “SMA”, 1 (2,5%) KK yang pekerjaannya “Tambak”. Secara umum pekerjaan Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros adalah nelayan/pedagang sekitar 75%

**c. Deskripsi Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Tingkat Pendapatan menunjukkan bahwa dari 40 Kepala Keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 9 (22%) KK diantaranya yang tingkat pendapatannya pada kategori “rendah”, 24 (60%) KK yang tingkat pendapatannya pada kategori “sedang”, 7 (18%) KK dengan tingkat pendapatan pada kategori “tinggi”. Secara umum tingkat pendapatan Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros berada pada kategori sedang

**3. Deskripsi kondisi fisik lingkungan permukiman desa-desa pesisir Pantai di Kabupaten Maros**

**a. Deskripsi Jenis Rumah masyarakat di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel jenis rumah masyarakat menunjukkan bahwa dari 40 Kepala Keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 6 (15%) KK diantaranya yang jenis rumahnya “permanen”, 14 (35%) KK yang jenis rumahnya “semi permanen”, 20 (50%) KK dengan jenis rumahnya “kayu (panggung)”.

**b. Deskripsi Lantai Dasar rumah masyarakat di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif lantai dasar rumah masyarakat menunjukkan bahwa dari 40 Kepala Keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 8 (20%) KK diantaranya yang lantai rumahnya “kramik/tegel”, 12 (30%) KK yang lantai rumahnya “plester”, 20 (50%) KK dengan lantai rumahnya “kayu”. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa, secara umum lantai rumah Kepala Keluarga di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros berada pada kategori baik.

**c. Deskripsi kecukupan cahaya matahari dalam rumah masyarakat di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kecukupan cahaya matahari dalam rumah masyarakat, menunjukkan bahwa dari 40 Kepala Keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebanyak 24 (60%) KK diantaranya yang cahaya matahari dalam rumahnya pada kategori “Cukup”, 10 (25%) KK yang cahaya matahari dalam rumahnya pada kategori “kurang Cukup”, 6 (15%) KK yang cahaya matahari dalam rumahnya pada kategori “tidak Cukup”. Distribusi

frekuensi menunjukkan bahwa, secara umum cahaya matahari dalam rumahnya masyarakat di Desa Pesisir Pantai Kabupaten Maros pada kategori “Cukup”.

#### **4. Keterkaitan antara karakteristik permukiman dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa-desa pesisir Pantai di Kabupaten Maros**

##### **a. Keterkaitan tingkat pendidikan dengan tipe permukiman pesisir pantai di Kabupaten Maros.**

Tingkat pendidikan anggota rumah tangga atau kepala keluarga juga berhubungan signifikan dengan tipe permukiman diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 4 (67%) orang Kepala Keluarga yang pendidikannya rendah memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik, ada 2 (33%) orang Kepala Keluarga yang pendidikannya sedang memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik, dan tidak ada 0 (0%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya tinggi memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik.
- 2) Terdapat 17 (85%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya rendah memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, ada 2 (10%) orang Kepala Keluarga yang pendidikannya sedang memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, dan ada 1 (5%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya tinggi memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang.
- 3) Terdapat 13 (93%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya rendah memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik, ada 1 (7%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya sedang memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik, dan tidak ada 0 (0,00%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya tinggi memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik.

##### **b. Keterkaitan jenis pekerjaan dengan tipe permukiman pesisir pantai di Kabupaten Maros.**

- 1) Terdapat 8 (61,54%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya nelayan memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik, ada 3 (23,08%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya petambak memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman

berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik, ada 2 (15,38%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya buruh tani memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe C* berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik,

- 2) Terdapat 12 (60,00%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya nelayan memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, ada 8 (40,00%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya petambak memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, dan tidak ada 0 (%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya buruh tani memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang
- 3) Terdapat 5 (71,43%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya nelayan memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik, ada 2 (28,57%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya petambak memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik, dan tidak ada 0 (%) orang Kepala Keluarga yang pekerjaannya buruh tani memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik

**c. Keterkaitan Tingkat Pendapatan dengan tipe permukiman pesisir pantai di Kabupaten Maros.**

- 1) Terdapat 5 (33,33%) orang Kepala Keluarga yang pendapatan rendah memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik, ada 7 (46,57%) orang Kepala Keluarga yang pendapatan sedang memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik, ada 3 (20,00%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya tinggi memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe A* adalah permukiman berpola mengelompok, kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan kurang baik.
- 2) Terdapat 2 (13,33%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya rendah memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, ada 11 (73,34%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya sedang memiliki rumah dengan kategori pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang, dan ada 2 (13,33%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya tinggi memiliki rumah dengan kategori

pemukiman *tipe B* adalah permukiman berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang.

- 3) Terdapat 2 (20,00%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya rendah memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik, ada 5 (50,00%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya sedang memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik, dan ada 3 (30,00%) orang Kepala Keluarga yang pendapatannya tinggi memiliki rumah dengan kategori pemukiman tipe C berpola random dan atau uniform, kepadatan rendah hingga sedang, dan kualitas bangunannya sedang hingga baik

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Karakteristik pemukiman masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Maros berada pada kategori tipe B dimana rumah berpola mengelompok dan atau random, kepadatan sedang, kualitas bangunan sedang
2. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di desa-desa pesisir Pantai Kabupaten Maros ditandai dengan tingkat pendidikan pada kategori rendah (tidak tamat SD dan SD), dicirikan oleh pekerjaan sektor nelayan, dan tingkat pendapatan sedang.
3. Kondisi lingkungan fisik rumah masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Maros dapat diketahui melalui jenis rumah didominasi kayu, lantai dasar rumah umumnya kayu, tipe atau ukuran rumah, dinding rumah, pencahayaan rumah katagori cukup.
4. Kondisi sosial-ekonomi berkaitan secara signifikan dengan karakteristik pemukiman, dimana semakain tinggi kondisi social ekonomi maka semakin baik karakteristik atau tipe pemukiman desa pesisir Pantai di Kabupaten Maros
5. Kondisi lingkungan fisik berkaitan secara signifikan dengan karakteristik pemukiman, dimana semakain baik kondisi fisik lingkungan maka semakin baik karakteristik atau tipe pemukiman desa pesisir Pantai di Kabupaten Maros
6. Secara umum tingkat bahaya terhadap bencana gelombang pasang di daerah penelitian berada pada tingkat sedang.

## Saran

1. Dinas Pemukiman dan Tata Ruang untuk melakukan sosialisasi kepada masya-rakat pesisir mengenai perumahan/pemukiman yang berkualitas
2. Dinas sosial untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya meningkat status sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Maros
3. Dinas sosial untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya meningkat status sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Maros
4. Dinas Pemukiman untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan fisik yang berkualitas

5. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Maros mengenai mitigasi bencana gelombang pasang secara intensif, mengingat masyarakat setempat kurang memiliki *kesadaran* terhadap potensi bencana tersebut.
6. Hendaknya kebijakan pengelolaan tata ruang daerah pesisir perlu dirumuskan secara sungguh-sungguh untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi pada kawasan itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, (1992). *UURI No.4 Tahun 1992: Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Anonimus, (2002). *Kebijakan dan strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (BKP4N)
- Ali Masduqi, dkk. (2008). *Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus HIPPAM di DAS Brantas Bagian Hilir*
- Budiyanto, F. X. (1991). *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Concerning Earthquake Risk Forecast By Remoto Sensing in The Tokyo Bay Area, *ISPRS, Vol, Part B7, P6 62-669*, Amsterdam.
- Daljoneni. (2003). *Geografi Kota Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Departemen Pekerjaan Umum-RI. (2007): Peraturam Menteri PU Nomor: 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Biro Humas Departemen PU-RI, Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2002). *Pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir*. Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta
- Eko Budihardjo (ed), (1992). *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Cetakan II. Bandung: Alumni
- Fajita, M. (1982). *Spatial Patterns of Residential Development*, Journal of Urban Economics 12 :22-52.
- Guswandi, (2008). *Lingkungan Permukiman*. PUSKIM, Bandung. Hlm 40.
- Giddens, Anthony. (1990). *Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Ida Bagus Mantra.. (2003). *Demografi Umum*. Nurcahya. Yogyakarta. Halaman 126
- Imron, (2003), *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*. Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Yunus, H. S. (1989). *Subject Matter dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota*. Fakultas Geografi UGM.
- Katayama, Ritsu et al., (2000). *A Research On The Urban Disaster Prevention Plan Concerning*

- Kartono Wirosuharjo. Dkk. (1985). *Kamus Istilah Demografi*. Pusat pembinaan
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Koentjaraningrat .(1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- Mulyanto Sumardi. (1982). *Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*. Rajawali. Jakarta.
- Moekijat. (1995). *Manajemen Kepegawaian*. Bandung: Alumni.
- Ritohardoyo, (2000). *Geografi Permukiman: Pengertian, Klasifikasi, Perumahan, dan Pola* Jurnal SMARTek, 3 (3): 190 - 198
- Soerjono Soekanto. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta.
- Sudharto P. H. (2001). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Cetakan I. Yogyakarta: GMU Press
- Sekretariat Negara RI. (2007): Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Biro Humas, Jakarta.
- Twig, J. & Batt, M, (Eds.). (1998). *Understanding Vulnerability: South Asian Perspective*. London: ITDG.
- The Liang Gie. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty
- Wahyu, Supriyadi Waskito. (2007). Pergeseran Mata Pencaharian Masyarakat Desa, Skripsi : FISIP UNS
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman